

## ABSTRAKSI

Wacana seputar demokrasi dan multikulturalisme kembali hangat diperdebatkan belakangan ini, bersimultan dengan gencarnya diskusi filosofis kontemporer mengenai Politik Pengakuan. Dalam diskursus filosofis mutakhir, Charles Taylor dan Axel Honneth ialah dua figur terkemuka yang sangat persisten mementaskan tema ini ke panggung diskusi filsafat sosial dan politik. Teori politik ini ingin mendiskusikan problematika hidup bersama dalam masyarakat multikultural-demokrasi. Kalimat utama yang mendasari politik pengakuan ialah bahwa berbagai konflik dan gerakan sosial yang terjadi di masyarakat merupakan manifestasi dari ketiadaan pengakuan, yang mencakup maldistribusi dan malrekognisi sekaligus.

Esensi politik ini sejatinya ingin menggagas tata kelola hidup bersama berdasarkan prinsip normatif pengakuan. Prinsip normatif pengakuan membawahi tiga dimensi fundamental rekognisi, yakni; *pengakuan cinta, kesetaraan hukum* atau *hak-hak* dan *solidaritas*. Konsep politik ini, berusaha memberi ruang bagi terciptanya tata peradaban manusiawi dengan pencarian kedalaman akan keluhuran martabat manusia dan kemasyhuran hidup bersama. Politik pengakuan lebih ingin menciptakan masyarakat yang bebas dan adil, yang mampu mengenali identitas personal partikular individu yang ada. Maka, pengakuan, demikian Honneth, harus menjadi prinsip normatif penataan masyarakat secara keseluruhan.

Honneth menggarisbawahi bahwa substansi demokrasi dan multikulturalisme dewasa ini ialah “perjuangan untuk pengakuan.” Berhadapan dengan fakta perbedaan dan konflik dalam masyarakat yang mejemuk, negara sering menerapkan pendekatan etika utilitaristik. Yakni, kebijakan yang cenderung membenarkan ketidakadilan terhadap kaum minoritas untuk menghindari reaksi negatif dari kelompok mayoritas. Politik pengakuan Honneth ingin mengkritisi realitas patologis semacam itu dengan berupaya menjelaskan gramatika moral dibalik setiap konflik sosial serta memberi landasan teoritis-normatif untuk mengevaluasi berbagai gerakan sosial yang ada dengan satu tujuan emansipatif yakni memperjuangkan kesetaraan, keadilan, dan respek terhadap perbedaan.

## ABSTRACT

Discourses around democracy and multiculturalism have been hotly debated lately, concurrently with the incessant contemporary philosophical discussion about the Politics of Recognition. In recent philosophical discourse, Charles Taylor and Axel Honneth are two prominent figures who are very persistent in bringing this theme to the stage of discussion of social and political philosophy. This political theory wants to discuss the problems of living together in a multicultural-democratic society. The main premise underlying the politics of recognition is that various conflicts and social movements that occur in society are manifestations of a lack of recognition, which includes maldistribution and malrecognition at the same time.

The essence of this politics is to initiate the governance of living together based on the normative principle of recognition. The normative principle of recognition covers three fundamental dimensions of recognition, namely; *recognition of love, legal equality or rights* and *solidarity*. This political concept seeks to provide space for the creation of a civilization of human order by seeking the depths of the nobility of human dignity and the fame of living together. The politics of recognition prefers to create a free and fair society, which is able to recognize the particular personal identity of existing individuals. Thus, recognition, according to Honneth, must be a normative principle of structuring society as a whole.

Honneth underlined that the substance of democracy and multiculturalism today is a “struggle for recognition”. Faced with the fact of differences and conflicts in a pluralistic society, the state often applies an utilitarianistic ethical approach. Namely, policies that tend to justify injustice against minorities to avoid negative reactions from the majority group. Honneth's acknowledgment politics wants to criticize this pathological reality by trying to explain the moral grammar behind every social conflict and provide a normative theoretical basis for evaluating various existing social movements with one emancipatory goal, namely struggling for equality, justice, and respect for differences.